



Available online at
<https://jurnal.unpad.ac.id/share/issue/archive>

Research Paper

Stigma Sosial dan Dampaknya terhadap Pelaporan Kekerasan Seksual Disabilitas

Anatasia Wahyudi¹

¹ Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia

*Correspondence author: anatasia184@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual pada penyandang disabilitas di Indonesia masih terhambat oleh minimnya akurasi data prevalensi nasional. Penelitian kuantitatif ini bertujuan menguji pengaruh sikap masyarakat terhadap kesadaran akan kesenjangan data tersebut. Survei dilakukan terhadap 451 responden di wilayah urban menggunakan teknik purposive sampling. Karakteristik partisipan didominasi oleh perempuan (57%) serta kelompok usia produktif (18-24 tahun). Mengacu pada Model Tripartit Sikap (Rosenberg & Hovland, 1960), analisis regresi menunjukkan bahwa pengetahuan risiko, persepsi trauma, dan dukungan kebijakan inklusif berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran data ($R^2 = 0,701$; $p < 0,001$). Temuan mediasi mengungkapkan bahwa kesadaran akan hambatan pelaporan berfungsi sebagai mediator parsial yang signifikan. Analisis tematik pendukung mempertegas bahwa stigma yang dilembagakan serta ketergantungan ekonomi menjadi rintangan utama bagi korban. Penelitian menyimpulkan bahwa data yang minim mencerminkan sistem yang belum inklusif. Rekomendasi mencakup reformasi sistem pelaporan yang ramah disabilitas serta penguatan peran praktisi pekerjaan sosial dalam mengeliminasi hambatan sistemik.

Kata Kunci: Hambatan Pelaporan, Kekerasan Seksual, Penyandang Disabilitas, Model Tripartit Sikap

ARTICLE INFO

Received: 10 28, 25

Received in revised form: 02 22, 26

Accepted: 08 01, 26

doi: <https://doi.org/10.24198/share.v16i1.67650>



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license

©Wahyudi (2026)

SHARE SOCIAL WORK JOURNAL

Published by Department of Social Welfare, Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Address: Department of Social Welfare, Building B FISIP-UNPAD, Bandung Sumedang km 21 Highway Jatinangor, Sumedang
Phone/Fax (022) 7796974, 7796416

Please cite this article in APA Style as:

Wahyudi, A. (2026). Stigma Sosial dan Dampaknya terhadap Pelaporan Kekerasan Seksual Disabilitas. *SHARE Social Work Journal*, 16(1), 36-48.
<https://doi.org/10.24198/share.v16i1.67650>

Abstract

Sexual violence against persons with disabilities in Indonesia remains hindered by a lack of accurate national prevalence data. This quantitative study aims to examine the influence of public attitudes on the awareness of this data gap. A survey was conducted with 451 respondents in urban areas using a purposive sampling technique. Participant characteristics were dominated by females (57%) and the productive age group of 18-24 years. Drawing on the Tripartite Model of Attitudes (Rosenberg & Hovland, 1960), regression analysis demonstrates that risk knowledge, trauma perception, and support for inclusive policies have a significant positive effect on data awareness ($R^2 = 0.701$; $p < 0.001$). Mediation findings reveal that awareness of reporting barriers serves as a significant partial mediator. Supporting thematic analysis emphasizes that institutionalized stigma and economic dependence constitute the primary obstacles for victims. This study concludes that minimal data reflects a system that is not yet inclusive. Recommendations include reforming disability friendly reporting systems and strengthening the role of social work practitioners in eliminating systemic barriers.

Keywords: Reporting Barriers, Sexual Violence, Persons with Disabilities, Tripartite Model of Attitudes.

1. Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan isu kritis di Indonesia yang memerlukan perhatian mendalam. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU 2024), di balik angka kekerasan secara umum terdapat celah data yang signifikan pada kelompok paling rentan yaitu perempuan penyandang disabilitas. Sepanjang tahun 2024 terdapat 163 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan disabilitas yang dihimpun melalui data lembaga dan pengaduan langsung. Kekerasan seksual menempati urutan kedua tertinggi dengan prevalensi mencapai 31,12 persen atau sebanyak 122 kasus. Angka ini menjadi indikasi kegagalan sistemis yang lebih besar dalam perlindungan sosial saat isu keadilan sosial telah menjadi determinan penting dalam kesejahteraan masyarakat modern (Lecomte et al., 2024).

Perempuan dengan disabilitas mental menjadi kelompok paling rentan dengan jumlah korban tertinggi mencapai 88 orang. Kelompok tersebut diikuti oleh disabilitas fisik sebanyak 25 korban, intelektual 23 korban, sensorik 18 korban, dan disabilitas ganda 3 korban. Tingginya angka pada kelompok disabilitas mental serta intelektual menunjukkan kebutuhan mendesak akan intervensi khusus karena mereka sering mengalami tantangan ganda berupa eksklusi gender dan stigmatisasi. Secara geografis sebaran kasus tertinggi terkonsentrasi di wilayah Jawa dengan Jawa Timur mencatatkan angka tertinggi sebesar 65 kasus, disusul Jawa Barat 17 kasus, dan DKI Jakarta 13 kasus. Perbedaan jumlah kasus antarprovinsi tersebut mencerminkan variasi dalam kesadaran korban untuk melapor, aksesibilitas layanan pengaduan, serta kemampuan pendokumentasian data di masing masing daerah.

Akar dari marginalisasi ini berkaitan erat dengan evolusi istilah dan definisi disabilitas yang berlaku di masyarakat Indonesia. Menurut (Widinarsih, 2019), pemahaman negatif publik sering kali bersumber dari pola pikir yang didominasi oleh konsep kenormalan. Ketika penyandang disabilitas didefinisikan berdasarkan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi standar normalitas, stigmatisasi menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan. Secara sosiopsikologis, fenomena ini dapat dipahami melalui *Stereotype Content Model* (SCM) yang menjelaskan bagaimana stereotip terbentuk melalui dimensi kehangatan (*warmth*) dan kompetensi (*competence*). Jones (2025) menekankan bahwa disabilitas sering kali dilekatkan pada stigma yang mereduksi identitas individu hanya pada hambatanya saja, yang kemudian memicu perilaku diskriminatif atau ableism.

Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya akses penyandang disabilitas terhadap pekerjaan. Data ILO menunjukkan 82 persen penyandang disabilitas di dunia hidup di negara berkembang dan berada di bawah garis kemiskinan (Erisa & Widinarsih, 2022). Mereka sulit mendapatkan berbagai akses termasuk bidang pekerjaan, kesehatan, informasi, dan politik. Peluang penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan jauh lebih rendah dibandingkan kelompok non disabilitas. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kapasitas individu serta minimnya akses terhadap informasi lowongan kerja pada waktu yang tepat. Ketergantungan ekonomi yang dihasilkan dari kondisi ini sering kali membuat posisi mereka semakin rentan dalam upaya mendapatkan keadilan.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa ranah personal atau privat menjadi tempat paling tidak aman bagi penyandang disabilitas. Sebanyak 93 korban mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang dekat, sementara 69 korban lainnya mengalami kekerasan di ranah publik dengan pelaku terbanyak adalah teman atau tetangga. Dampak psikologis trauma seperti PTSD sering kali tidak tertangani secara optimal akibat kurangnya layanan kesehatan mental yang inklusif (Dworkin, 2020; McNally et al., 2021). Pembangunan inklusif di Indonesia masih menghadapi tantangan besar karena dominasi paradigma charity-based yang menganggap disabilitas sebagai individu tidak mandiri (Apsari & Raharjo, 2021; Hastuti et al., 2020).

Meskipun regulasi seperti UU No. 8 Tahun 2016 dan UU TPKS (2022) telah disahkan, implementasinya di tingkat daerah masih terhambat secara struktural. Efektivitas aturan ini sangat bergantung pada peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagai motivator, inisiator, dinamisator, dan fasilitator. Namun penelitian Muktiwibowo & Prayogi (2022) mengungkapkan PSM sering menghadapi hambatan besar saat menjalankan peran sebagai inisiator pemecahan masalah ekonomi keluarga. Kegagalan ini berakar pada kelemahan faktor masyarakat dan kebudayaan hukum yang masih menstigma korban (Tan, 2021; Tarigan & Rosmalinda, 2025).

Penelitian ini menggunakan Model Tripartit Sikap Rosenberg & Hovland (1960) dalam Kaligis et al. (2020) sebagai kerangka kerja guna mengukur pengaruh sikap masyarakat terhadap kesadaran akan kurangnya data prevalensi melalui komponen kognitif, afektif, dan konatif. Pengetahuan dan interaksi langsung telah terbukti menjadi prediktor signifikan dalam membentuk sikap sosial tersebut (Babik & Gardner, 2021). Celah literatur dalam konteks Indonesia adalah minimnya studi kuantitatif yang menguji hubungan empiris antara struktur psikologis masyarakat dengan pengakuan kegagalan pendataan melalui dimensi Model Tripartit. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan menguji model mediasi kausalitas melalui pemahaman terhadap Hambatan Pelaporan (Z) guna merumuskan arah baru bagi reformasi kebijakan dan praktik pekerjaan sosial yang lebih inklusif di Indonesia.

2. Metode

Prosedur dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *survei cross-sectional* untuk memetakan persepsi masyarakat umum di wilayah urban Jakarta. Pengumpulan data dilakukan secara daring melalui platform survei profesional Jakpat kepada panel responden yang terverifikasi. Teknik *convenience sampling* diterapkan melalui sistem distribusi otomatis platform yang menyasar profil responden berusia 18-45 tahun. Seluruh proses pengambilan data diselesaikan dalam waktu 24 jam untuk menjamin efisiensi tanpa mengurangi kualitas respons, mengingat platform ini memiliki sistem kontrol kualitas untuk mencegah pengisian ganda (*double response*). Dari total 475 respons awal yang masuk, dilakukan tahap pembersihan data (*data cleaning*) melalui analisis Z-score. Sebanyak 24 respons dihapus karena terdeteksi sebagai outlier dan inkonsistensi jawaban, sehingga diperoleh sampel akhir sebanyak 451 responden yang valid untuk dianalisis.

Instrumen Penelitian dan Pengukuran

Pengukuran variabel dilakukan dengan mengadaptasi skala-skala internasional guna merepresentasikan dimensi dalam Model Tripartit Sikap (Rosenberg & Hovland, 1960 dalam (Kaligis et al., 2020)). Model ini dipilih karena kemampuannya membedah stigma melalui tiga dimensi psikososial yang saling berkaitan:

- a. Pengetahuan Risiko (X1): Mewakili komponen kognitif, mengukur keyakinan responden terhadap risiko kekerasan melalui adaptasi *Violence Risk Scale (VRS)* (Wong & Gordon, 2006).
- b. Persepsi Trauma (X2): Mewakili komponen afektif, mengukur respons emosional masyarakat terhadap dampak kekerasan melalui adaptasi *Michigan Critical Events Perception Scale (MCEPS)* (Ayers et al., 2016).
- c. Sikap Kebijakan Inklusif (X3): Mewakili komponen konatif, mengukur kecenderungan perilaku masyarakat dalam mendukung perlindungan hak disabilitas melalui adaptasi *Multidimensional Attitudes Scale (MAS)* (Findler et al., 2016).

- d. Hambatan Pelaporan (Z) dan Kesadaran Data (Y): Variabel ini diukur berdasarkan sintesis konsep Stigma Sosial (Goffman, 1963; Tangney & Dearing, 2022) dan kerangka Kebijakan Berbasis Bukti (Davies, 2004), guna mengidentifikasi sejauh mana masyarakat menyadari adanya rintangan struktural yang mengaburkan validitas data prevalensi nasional.

Seluruh variabel diukur menggunakan skala Likert 4 poin (1 = Sangat Tidak Setuju, 4 = Sangat Setuju). Pemilihan skala genap bertujuan untuk meminimalkan *central tendency bias* (kecenderungan responden memilih jawaban netral), sehingga memaksa responden mengambil posisi afirmatif atau negatif terhadap isu sensitif ini.

Teknik Analisis Data dan Reliabilitas

Data dianalisis menggunakan regresi berganda dan uji mediasi menggunakan PROCESS Macro Hayes (Model 4) dalam perangkat lunak SPSS. Konsistensi internal instrumen diuji menggunakan Cronbach's Alpha (α). Berdasarkan analisis terhadap 451 responden, diperoleh nilai reliabilitas sebagai berikut: Skala Sikap (X) sebesar $\alpha = 0,892$; Skala Hambatan Pelaporan (Z) sebesar $\alpha = 0,845$; dan Skala Kesadaran Data (Y) sebesar $\alpha = 0,81$. Nilai $\alpha > 0,70$ pada seluruh skala menunjukkan bahwa instrumen penelitian ini memiliki reliabilitas yang sangat baik dan konsisten secara internal.

Kerangka Kerja Mediasi dan Relevansi Pekerjaan Sosial

Penelitian ini bertujuan menguji model mediasi kausalitas untuk memberikan bukti empiris mengenai struktur psikologis yang mendasari masalah data prevalensi. Pengaruh Sikap (X) terhadap Kesadaran Data (Y) diperkirakan tidak terjadi secara tunggal, melainkan dimediasi oleh pemahaman terhadap Hambatan Pelaporan (Z) yang mencakup rintangan struktural dan stigma sosial. Dalam konteks Pekerjaan Sosial, identifikasi terhadap variabel-variabel ini sangat krusial guna merancang intervensi makro dan advokasi kebijakan yang lebih responsif. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi landasan bagi reformasi layanan kemanusiaan dan kampanye edukasi yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

3. Hasil Penelitian

Profil Demografi dan Kualitas Data

Analisis dilakukan terhadap 451 responden di DKI Jakarta setelah melalui proses pembersihan data dari *outlier* ekstrem menggunakan Mahalanobis Distance. Mayoritas responden adalah perempuan (57%) dengan dominasi kelompok usia muda (18-24 tahun sebanyak 51,7%). Mayoritas partisipan berpendidikan SMA (57,6%) dan bekerja sebagai karyawan (36,1%). Secara ekonomi, 49% responden berada pada rentang pendapatan Rp1.000.000 - Rp2.000.000 per bulan.

Tabel 1. Informasi Demografi Responden

	Frekuensi	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Perempuan	257	57%
Laki-laki	194	43%
Total	451	100%
Usia		
18-24 tahun	233	51,7%
25-34 tahun	145	32,2%
35-45 tahun	73	16,1%
Total	451	100%
Pendidikan		
SMP/Sederajat	22	4,9%

SMA/Sederajat	260	57,6%
Diploma (D1-D3)	29	6,4%
S1	135	29,9%
S2	5	1.1%
Total	451	451
Profesi		
Mahasiswa	118	26,2%
Karyawan	162	36,1%
Wirausaha	42	9,3%
Ibu rumah tangga	44	9,8%
Lainnya	84	18,6%
Total	451	100%
Pendapatan/bulan		
Rp1.000.000- Rp2.000.000	221	49%
Rp2.000.001- Rp3.000.000	42	9,4%
Rp3.000.001- Rp4.000.000	53	11,8%
Rp4.000.001- Rp5.000.000	42	9,3%
Rp5.000.001- Rp6.000.000	35	7,8%
<Rp6.000.001	58	12,9%
Total	451	100%

Uji Asumsi Klasik dan Kualitas Data

Uji kualitas data menunjukkan seluruh instrumen valid (R hitung > 0,094) dan reliabel (α > 0,70). Meskipun terdeteksi gejala heteroskedastisitas pada *scatterplot*, masalah ini diatasi melalui metode *Bootstrapping* pada analisis mediasi guna memperoleh estimasi *standard error* yang lebih stabil dan *robust*.

Analisis Regresi dan Uji Hipotesis Langsung

Model regresi menunjukkan bahwa variabel sikap (X) dan kontrol secara signifikan memprediksi Kesadaran Data (Y) ($R^2 = 0,701$; $p < 0,001$). Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Pengetahuan Risiko (H1: $\beta = 0,266$), Persepsi Trauma (H2: $\beta = 0,383$), dan Kebijakan Inklusif (H3: $\beta = 0,178$) berpengaruh positif signifikan terhadap Y. Sementara itu, Jenis Kelamin (H4: $\beta = -0,312$) memiliki pengaruh negatif signifikan.

Tabel 2. Uji Hipotesis

Model	Unstandardized β	Std. Error	Standardized Coefficients (β)	t	Sig. (p)	Decision
(Constant)	-0,681	0,564		-1,208	0,228	
H1: Pengetahuan Risiko (X1)	0,266	0,027	0,368	9.110	<0,001	Didukung
H2: Persepsi Trauma (X2)	0,383	0,054	0,346	5.744	<0,001	Didukung

H3: Kebijakan Inklusif (X3)	0,178	0,037	0,218	4.871	<0,001	Didukung
H4: Jenis Kelamin (Kontrol)	-0,312	0,147	-0,056	-2,120	0,035	Didukung
Statistik Model R ²	0,701					

Nilai Interval Kepercayaan (CI) pada H5, H6, dan H7 yang tidak melewati angka nol, maka peran Z sebagai mediator adalah sah secara statistik. Ini adalah temuan paling penting: Sikap masyarakat tidak langsung tiba-tiba membuat mereka sadar soal data, melainkan karena mereka paham dulu bahwa ada rintangan besar (Z) yang dihadapi korban.

Analisis Tematik

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme mediasi yang ditemukan secara kuantitatif, dilakukan analisis tematik terhadap respons terbuka dari para partisipan. Analisis ini bertujuan untuk mengeksplorasi alasan subjektif masyarakat di balik kesadaran mereka terhadap minimnya data prevalensi.

Tabel 4. Analisis Tematik Responden

Tema	Penjelasan	Contoh Kutipan Responden	Kaitannya dengan Teori / Data
1. Pengalaman & Kerentanan Korban	Isu ini menyoroti bahwa penyandang disabilitas, terutama dengan disabilitas tertentu, sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual. Mereka sering kali tidak memiliki keberanian atau pengetahuan untuk melawan dan melaporkan.	"Ada dari kerabat terdekat," "Waktu sd... ada salah satu anak perempuan yang maaf dia autis dipegang bagian dadanya oleh orang lewat..."	Sejalan dengan literatur Ledingham et al (2022; Mailhot Amborski et al (2022), yang menyatakan penyandang disabilitas menghadapi risiko lebih tinggi karena faktor seperti ketergantungan pada pengasuh dan kurangnya pemahaman. Studi (Banisaeed et al (2022) juga mengonfirmasi bahwa rasa tidak berdaya dan putus asa membuat korban enggan melapor.
2. Kebutuhan Hukum dan Penegakan	Responden menyarankan tindakan yang lebih kuat dari pemerintah, termasuk pembentukan unit kepolisian yang terlatih khusus.	"Hukum harus adil untuk penyandang disabilitas," "Pemerintah dapat memberikan edukasi terkait kekerasan seksual."	Meskipun UU TPKS (2022) telah disahkan, implementasinya masih kurang optimal. Hal ini sejalan dengan temuan Silvia Pramashela & Abdul Rachim, 2021 dan Tarigan & Rosmalinda (2025) yang menyoroti kurangnya pelatihan aparat hukum dan layanan ramah disabilitas.
3. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat	Tema ini menekankan pentingnya edukasi yang inklusif, tidak hanya untuk masyarakat umum tetapi juga untuk	"Harus ada edukasi untuk orang-orang terdekat seperti keluarga, saudara,	Selaras dengan Teori Sikap Sosial Fishbein & Ajzen (1975) dan penelitian Babik & Gardner (2021) dan Karki et al (2023) yang menunjukkan bahwa

	penyandang disabilitas itu sendiri dan orang-orang terdekat mereka.	<i>masyarakat sekitar..."</i>	pengetahuan dan informasi membentuk sikap dan kesadaran masyarakat. Studi Azizah et al (2024) juga mengungkapkan rendahnya pengetahuan tentang kekerasan seksual di kalangan penyandang disabilitas.
4. Dukungan dan Pendampingan	Pentingnya dukungan dari keluarga dan profesional untuk membantu korban pulih dari trauma dan berani melapor. Pendampingan psikologis dan hukum yang memahami kebutuhan khusus korban dianggap vital.	<i>"Korban membutuhkan pendampingan hukum dan psikologis yang berkelanjutan dari tenaga profesional," "Perhatian dan kasih sayang dari orangtua sangat berpengaruh untuk mereka."</i>	Mengacu pada literatur Dworkin (2020) yang menjelaskan bahwa trauma akibat kekerasan seksual diperparah oleh isolasi sosial dan kurangnya layanan kesehatan mental yang inklusif. Pendampingan yang baik juga sejalan dengan UU TPKS (2022) yang mengamanatkan perlindungan bagi korban.
5. Aksesibilitas dan Fasilitas	Responden menyoroti perlunya sistem pelaporan yang mudah diakses secara fisik dan digital, serta fasilitas pendukung yang inklusif untuk penyandang disabilitas.	"Sistem pelaporan harus dibuat ramah disabilitas, baik secara fisik maupun digital," "Pastikan informasi yang diberikan... mudah diakses dan dipahami sesuai dengan jenis disabilitas."	Berhubungan dengan studi Davy et al (2025) yang menyarankan lembaga perlindungan untuk menyediakan informasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Hal ini juga didukung oleh teori Stigma Sosial Goffman (1963) dalam Aranda et al (2023), yakni kurangnya aksesibilitas dapat memperkuat stigma dan menghambat pelaporan.

4. Pembahasan

Interpretasi Komponen Kognitif, Afektif, dan Konatif

Pengaruh signifikan dan positif dari Pengetahuan tentang Risiko Ke¹kerasan (X1) dan Persepsi tentang Dampak Trauma (X2) menunjukkan bahwa fondasi kesadaran masyarakat dibangun di atas dimensi kognitif dan afektif. Semakin banyak informasi yang dimiliki masyarakat mengenai kerentanan penyandang disabilitas (X1), dan semakin besar empati serta pemahaman mereka terhadap konsekuensi psikologis (PTSD, depresi, risiko bunuh diri) yang dialami korban (X2), semakin tinggi kesadaran mereka bahwa angka kasus resmi yang minim tidak mencerminkan realitas. Temuan ini selaras dengan literatur yang menyoroti dampak parah trauma pada korban disabilitas (Dworkin, 2020; Kamilla Azhar et al., 2023). Secara implisit, ketika masyarakat menyentuh dimensi afektif ini, mereka menyadari bahwa dampak trauma yang begitu berat pasti disertai dengan kegagalan sistematis dalam pelaporan.

Dinamika Jenis Kelamin dan *Painful Realism*

Koefisien negatif pada jenis kelamin perempuan menunjukkan tingkat kesadaran data yang lebih rendah secara statistik. Sejalan dengan McQueen et al. (2021), hal ini dimaknai sebagai "*painful realism*"; perempuan cenderung lebih pesimis terhadap akurasi data pemerintah karena mereka lebih menyadari

kedalaman stigma dan hambatan pelaporan di lapangan. Penemuan ini bukan menunjukkan kurangnya perhatian, melainkan pemahaman yang lebih tajam bahwa data yang tercatat jauh dari akurat.

Pembahasan Temuan Mediasi: Z sebagai Mediator Parsial

Temuan ini adalah kontribusi paling krusial dalam penelitian ini, menegaskan bahwa sikap masyarakat memengaruhi kesadaran data tidak hanya secara langsung, tetapi juga secara substansial melalui pemahaman mereka terhadap rintangan yang menghalangi korban melapor. Peran mediasi parsial mengindikasikan bahwa semakin positif sikap masyarakat (pengetahuan, empati, dan dukungan kebijakan), semakin tinggi pula pemahaman mereka terhadap faktor-faktor penyebab minimnya data, seperti stigma sosial dan kelemahan sistem hukum.

Temuan ini memberikan konfirmasi empiris pada kritik Ledingham et al. (2022) yang menekankan kerentanan struktural penyandang disabilitas akibat isolasi sosial dan ketergantungan. Dalam konteks Indonesia, kesadaran ini mencakup pemahaman bahwa sistem pasca-pengesahan UU TPKS masih memiliki implementasi yang lambat dan alokasi anggaran yang tidak sensitif disabilitas (Tarigan & Rosmalinda, 2025). Dengan demikian, kesadaran data (Y) adalah produk dari sikap positif yang disalurkan melalui lensa kritis terhadap kinerja sistem (Z).

Pengendalian variabel jenis kelamin dalam analisis mediasi juga menguatkan interpretasi ini. Walaupun koefisien jenis kelamin menunjukkan perempuan lebih pesimis terhadap akurasi data (H4), efek mediasi ($X1 \rightarrow Z \rightarrow Y$) tetap signifikan. Hal ini menyiratkan bahwa mekanisme mediasi (jalur yang menghubungkan sikap ke kesadaran melalui hambatan) berlaku secara universal di seluruh kelompok gender. Artinya, terlepas dari tingkat kesadaran dasar mereka, pemahaman terhadap hambatan sistemik (Z), seperti stigma yang menciptakan viktimisasi sekunder adalah kunci utama yang membuat masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan) akhirnya menyadari bahwa angka kasus yang tercatat selama ini tidak valid (McQueen et al., 2021). Minimnya data prevalensi (Y) pada akhirnya disimpulkan sebagai cerminan dari kegagalan sistem sosial dan hukum untuk menjamin perlindungan.

Sintesis Temuan: Stigma yang Dilembagakan

Kesimpulan analisis tematik menunjukkan isu ini berakar pada stigma sosial yang dilembagakan (*institutionalized stigma*). Penggunaan istilah dikotomis "normal" dan "tidak normal" memvalidasi bahwa masyarakat masih memandang penyandang disabilitas sebagai kelompok yang terpisah. Pemahaman akan buruknya fasilitas pendukung inilah yang menjadi "jembatan kognitif" bagi masyarakat untuk bersikap kritis terhadap validitas data pemerintah. Hal ini memperkuat proposisi bahwa peningkatan kognitif dan afektif melalui edukasi adalah satu-satunya cara mengeliminasi hambatan pelaporan.

Selanjutnya, hasil analisis tematik ini memperjelas mekanisme mediasi yang sebelumnya ditemukan dalam uji statistik. Responden secara eksplisit mengidentifikasi adanya celah besar dalam sistem pelaporan, penegakan hukum, dan aksesibilitas fasilitas publik. Pemahaman masyarakat akan buruknya fasilitas pendukung dan lemahnya perlindungan hukum bagi disabilitas inilah yang menjadi "jembatan kognitif" yang membuat mereka menyadari bahwa angka kasus yang tercatat selama ini tidak mencerminkan realitas sesungguhnya. Temuan ini menegaskan bahwa kesadaran akan hambatan pelaporan (Z) merupakan prasyarat utama bagi masyarakat untuk bersikap kritis terhadap validitas data pemerintah (Y).

Terakhir, sintesis ini menunjukkan bahwa solusi terhadap isu kekerasan seksual pada penyandang disabilitas tidak dapat hanya bertumpu pada perbaikan sistem hukum teknis semata, tetapi harus menyasar pada perubahan sikap sosial yang mendalam. Analisis tematik memperlihatkan bahwa edukasi

yang inklusif merupakan kebutuhan mendesak yang mencakup berbagai level, mulai dari keluarga, lingkungan sosial, hingga aparaturnegara. Hal ini memperkuat proposisi Teori Sikap Sosial bahwa peningkatan komponen kognitif (pengetahuan risiko) dan afektif (empati terhadap trauma) melalui edukasi berkelanjutan adalah satu-satunya cara untuk mengeliminasi hambatan pelaporan, yang pada akhirnya akan meningkatkan akurasi data prevalensi di Indonesia.

Implikasi terhadap Pekerjaan Sosial

Temuan mediasi parsial yang konsisten di seluruh model penelitian ini merupakan hasil yang paling krusial dan mendalam bagi praktik pekerjaan sosial. Signifikansi Kesadaran tentang Hambatan Pelaporan (Z) sebagai mediator menunjukkan bahwa pengaruh sikap masyarakat terhadap perbaikan data bukanlah proses linear, melainkan sebuah proses yang dimediasi oleh kesadaran kognitif akan adanya kegagalan sistemik. Pekerjaan sosial tidak dapat hanya berfokus pada peningkatan sikap suportif (X) atau kesadaran data (Y) secara terpisah; intervensi harus secara strategis menargetkan Hambatan Pelaporan (Z) itu sendiri sebagai jembatan kognitif. Kesadaran akan hambatan tersebut mencakup pengakuan terhadap stigma sosial yang melembaga (*institutionalized stigma*) dan kelemahan dalam sistem layanan kemanusiaan yang menghalangi korban mencapai perlindungan sosial (*Social Protection*).

Stigma dalam konteks ini harus dipahami sebagai hambatan struktural, bukan sekadar pandangan individu. Stigma yang dilembagakan berwujud pada penyalahan korban, rasa malu, serta ketakutan, yang menjadi akar masalah minimnya data prevalensi (Hastuti et al., 2020). Kerentanan tersebut diperparah oleh kondisi ekonomi penyandang disabilitas yang mayoritas hidup di bawah garis kemiskinan serta memiliki peluang kerja jauh lebih rendah dibandingkan kelompok non disabilitas (Erisa & Widinarsih, 2022). Rendahnya kapasitas individu dan minimnya akses terhadap informasi lapangan kerja menciptakan ketergantungan ekonomi yang pada akhirnya membungkam korban untuk melaporkan kekerasan yang dialami. Diskriminasi ini bahkan ditemukan tetap eksis di lingkungan profesional dan akademik. Menurut Lindsay & Fuentes (2022), *ableism* struktural sering kali memaksa individu untuk menyembunyikan kondisi disabilitas mereka demi menghindari konsekuensi karier yang negatif.

Oleh karena itu, tugas mendesak bagi praktisi pekerjaan sosial adalah menggeser fokus intervensi dari korban ke arah sistem. Hal ini berarti pekerjaan sosial harus memimpin inisiatif anti-stigma pada tingkat komunitas maupun di dalam Organisasi Pelayanan Kemanusiaan (*Human Service Organization/HSO*) guna memastikan prosedur pelaporan bersifat ramah disabilitas dan tidak menciptakan viktimisasi sekunder (McQueen et al., 2021). Upaya ini harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak ekonomi. Pekerja sosial wajib mendorong kebijakan inklusif di sektor ketenagakerjaan untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas sehingga mereka memiliki kemandirian finansial yang mampu mengurangi risiko eksploitasi.

Temuan yang menunjukkan perbedaan kesadaran signifikan berdasarkan jenis kelamin (H4) menuntut agar intervensi anti-stigma dirancang secara sensitif gender. Program harus secara spesifik menyoroti perbedaan persepsi risiko serta kerentanan antara laki-laki dan perempuan, terutama mengoreksi pandangan pesimis kelompok perempuan terhadap akurasi data sebagai cerminan kegagalan sistem. Hal ini berkaitan erat dengan dimensi praktis di lapangan saat Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) harus mengoptimalkan perannya sebagai inisiator dalam pemecahan masalah ekonomi keluarga dan motivator bagi orang tua yang tidak konsisten dalam proses rehabilitasi (Muktiwibowo & Prayogi, 2022).

Temuan bahwa Kesadaran Hambatan (Z) mendorong Kesadaran Data (Y) menyiratkan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) harus didefinisikan ulang sebagai pemberdayaan berbasis sistem. Mengacu pada pemikiran Jones (2025), identitas disabilitas harus dilihat melalui lensa Social Identity Theory yang menekankan agensi dan resistensi terhadap *ableism*. Program bagi penyandang disabilitas tidak cukup hanya meningkatkan keberanian individu, tetapi wajib melibatkan advokasi sistemik untuk menghilangkan hambatan Z. Langkah ini mencakup pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum serta

profesional kesehatan mental, juga desain ulang fasilitas komunikasi agar korban dapat melapor tanpa rasa takut.

Kebutuhan akan keterampilan teknis ini dipertegas oleh temuan ((Ramdyanti et al. 2022) yang menekankan pentingnya komunikasi interpersonal dalam intervensi krisis. Meskipun tahapan protokol seperti penilaian *lethality* dan eksplorasi perasaan telah dilakukan, kelemahan komunikasi interpersonal praktisi dapat menjadi hambatan baru bagi korban untuk terbuka. Oleh karena itu, pekerja sosial memiliki peran vital dalam merancang Kampanye Edukasi Komunitas yang Komprehensif berdasarkan Model Tripartit Sikap. Pekerja sosial perlu menghubungkan pengetahuan risiko (X1) dan empati trauma (X2) dengan kebutuhan kebijakan inklusif (X3), sembari mengasah keterampilan mikro dalam intervensi krisis guna mengeliminasi hambatan pelaporan (Z) secara total serta inklusif.

Dekonstruksi Kenormalan dan Ableisme Struktural dalam Institusi

Temuan dalam penelitian ini mengenai penggunaan istilah dikotomis "*normal*" dan "*tidak normal*" oleh responden mencerminkan kegagalan dalam memahami hak asasi penyandang disabilitas secara tepat (Widinarsih, 2019). Pola pikir yang berfokus pada kenormalan tersebut menciptakan hambatan sistemik yang bahkan merambah hingga ke institusi formal. Secara sosiopsikologis, fenomena ini dapat dibedah melalui *Stereotype Content Model* (SCM) yang dijelaskan oleh (Jones, 2025). Model ini menyoroti bagaimana persepsi masyarakat terhadap kelompok disabilitas sering kali terjebak dalam penilaian rendah pada dimensi kompetensi (*competence*), meskipun terkadang dinilai tinggi pada dimensi kehangatan (*warmth*). Rendahnya persepsi kompetensi ini menyebabkan kesaksian atau laporan korban kekerasan seksual sering kali tidak dianggap valid oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat luas.

Kaitan antara temuan ini dengan konteks institusi global menunjukkan bahwa hambatan pelaporan (Z) bukan sekadar masalah teknis administrasi, melainkan hasil dari budaya organisasi yang *ableis*. Sejalan dengan tinjauan sistematis oleh Lindsay & Fuentes (2022), *ableism* bermanifestasi secara nyata melalui diskriminasi, eksklusi sosial, dan marginalisasi bahkan di lingkungan akademik yang seharusnya inklusif. Di banyak negara, pengungkapan kondisi disabilitas (*disclosure*) menjadi dilema besar karena ketakutan akan stigma serta dampak negatif terhadap pengembangan karier. Jika pada level profesional dan akademik saja diskriminasi begitu kuat, maka kerentanan korban kekerasan seksual di tingkat akar rumput menjadi berlipat ganda karena mereka merasa sistem tidak akan pernah berpihak pada mereka.

Namun, Jones (2025) juga menawarkan perspektif perlawanan melalui Social Identity Theory, yang menekankan bahwa identitas disabilitas dapat menjadi basis bagi kolektivitas dan resistensi. Konsep '*Disabled joy is resistance*' menantang narasi ableisme yang selalu memandang disabilitas sebagai penderitaan semata. Integrasi pemikiran ini dalam praktik pekerjaan sosial sangat krusial guna memastikan bahwa intervensi krisis tidak hanya bertujuan memulihkan trauma, tetapi juga membangun ruang anti *ableis* yang menghargai agensi serta hak asasi korban. Saat institusi tinggi dan tempat kerja masih mempertahankan struktur yang diskriminatif, masyarakat secara luas akan terus memandang disabilitas melalui lensa stigma yang membungkam suara korban.

5. Simpulan

The Penelitian ini menyimpulkan bahwa minimnya data prevalensi kekerasan seksual pada penyandang disabilitas di Indonesia bukan sekadar masalah teknis statistik. Fenomena tersebut merupakan manifestasi nyata dari sikap masyarakat yang belum sepenuhnya suportif serta sistem perlindungan yang masih bersifat *ableis*. Melalui pengujian Model Tripartit Sikap, penelitian ini

membuktikan bahwa komponen kognitif, afektif, dan konatif secara fundamental membangun kesadaran masyarakat akan urgensi masalah ini. Temuan krusial dari analisis mediasi mempertegas bahwa pengaruh sikap masyarakat terhadap kesadaran data dijumpai oleh pemahaman publik terhadap Hambatan Pelaporan (Z). Hambatan tersebut mencakup stigma sosial yang dilembagakan, rasa takut korban, keterbatasan sistem hukum, hingga kerentanan ekonomi yang mendalam.

Justifikasi ilmiah dari penelitian ini memberikan arah baru bagi bidang Pekerjaan Sosial untuk menggeser fokus intervensi pada eliminasi hambatan pelaporan melalui advokasi sistemik. Rendahnya akses penyandang disabilitas terhadap pekerjaan serta pengalaman diskriminasi di ranah profesional maupun akademik merupakan faktor kunci yang melanggengkan kebisuhan korban (Lindsay & Fuentes, 2022). Oleh karena itu, reformasi kebijakan harus mengintegrasikan perlindungan hukum dengan pemberdayaan ekonomi guna memutus rantai ketergantungan. Dekonstruksi terhadap konsep kenormalan yang diskriminatif sebagaimana disarankan oleh Widinarsih (2019) menjadi syarat mutlak dalam membangun ruang sosial yang benar benar inklusif.

Secara praktis, efektivitas penanganan di tingkat akar rumput sangat bergantung pada penguatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat sebagai inisiator ekonomi serta motivator bagi keluarga korban. Hal tersebut harus didukung dengan peningkatan keterampilan komunikasi interpersonal dalam intervensi krisis agar praktisi mampu menembus hambatan psikologis korban secara profesional (Ramdyanti et al., 2022). Edukasi publik harus berfokus pada pendekatan berbasis hak asasi manusia guna membangun ruang anti ableis yang mengakui identitas disabilitas bukan sebagai penderitaan, melainkan sebagai bentuk resistensi dan agensi (Jones, 2025). Dengan menyatukan perubahan persepsi masyarakat, perbaikan infrastruktur layanan hukum, serta kemandirian ekonomi, Indonesia dapat menciptakan ekosistem yang tidak hanya akurat secara data tetapi juga adil bagi seluruh penyandang disabilitas.

6. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan responden yang didominasi oleh kelompok usia produktif di wilayah urban, sehingga generalisasi hasil pada wilayah rural dengan karakteristik budaya berbeda perlu dilakukan dengan hati hati. Selain itu, penggunaan survei mandiri memiliki potensi bias keinginan sosial saat responden cenderung memberikan jawaban yang normatif secara moral. Penelitian masa depan disarankan untuk menguji secara longitudinal efektivitas program pemberdayaan ekonomi terhadap keberanian melapor pada korban disabilitas. Diperlukan pula studi komparatif antara wilayah urban dan rural untuk memetakan pengaruh kearifan lokal terhadap stigma sistemik yang teridentifikasi dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai dampak ableism di institusi pendidikan tinggi dan tatanan profesional di Indonesia guna memperluas ruang lingkup inklusivitas di berbagai level sistemik.

Referensi

- Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2021). Orang dengan Disabilitas: Situasi Tantangan dan Layanan di Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 24(3), 159–169. <https://doi.org/10.22435/hsr.v24i3.3069>
- Aranda, A. M., Helms, W. S., Patterson, K. D. W., Roulet, T. J., & Hudson, B. A. (2023). Standing on the shoulders of Goffman: Advancing a relational research agenda on stigma. *Business and Society*, 62(7), 1339–1377. <https://doi.org/10.1177/00076503221148441>
- Ayers, S., Bond, R., Bertullies, S., & Wijma, K. (2016). The aetiology of post-traumatic stress following childbirth: a meta-analysis and theoretical framework. *Psychological Medicine*, 46(6), 1121–1134. <https://doi.org/10.1017/S0033291715002706>

- Azizah, W., Mariyona, K., & Haninda, P. (2024). Gambaran pengetahuan remaja penyandang disabilitas tentang pelecehan seksual di SLB N 1 Bukittinggi Kota Bukittinggi Tahun 2023. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 9511–9520. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10498>
- Babik, I., & Gardner, E. S. (2021). Factors Affecting the Perception of Disability: A Developmental Perspective. *Frontiers in Psychology*, 12, 702166. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.702166>
- Banisaheed, R. A., Aljedayah, K. S., Qudah, H. A. Al, Rababa, E. M., & AL-Momani, M. O. (2022). The Level of Learned Disability among a Sample of Abused Women in Jordan. *Universal Journal of Public Health*, 10(3), 265–277. <https://doi.org/10.13189/ujph.2022.100304>
- Davies, P. (2004). Sociology and policy science: Just in time? *British Journal of Sociology*, 55(3), 447–450. <https://doi.org/10.1111/J.1468-4446.2004.00030.x>
- Davy, L., Robinson, S., Idle, J., & valentine, kylie. (2025). Regulating vulnerability: policy approaches for preventing violence and abuse of people with disability in Australian service provision settings. *Disability & Society*. <https://doi.org/10.1080/09687599.2024.2323456>
- Dworkin, E. R. (2020). Risk for Mental Disorders Associated With Sexual Assault: A Meta-Analysis. *Trauma, Violence, and Abuse*, 21(5), 1011–1028. <https://doi.org/10.1177/1524838018813198>
- Erissa, D., & Widinarsih, D. (2022). Akases Penyandang Disabilitas Terhadap Pekerjaan: Kajian Literatur. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 3(1), 22. <https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1027>
- Findler, L., Vilchinsky, N., & Werner, S. (2016). Multidimensional Attitudes Scale toward Persons with Disabilities. *PsycTESTS Dataset*. <https://doi.org/10.1037/T48910-000>
- Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. Penguin .
- Hastuti, Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H. (2020). *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*. www.smeru.or.id.
- Jones, S. E. (2025). 'Disabled joy is resistance': Insights and recommendations from social psychology on reducing ableism. *British Journal of Social Psychology*, 64(3), e12893. <https://doi.org/10.1111/bjso.12893>
- Kaligis, R. A. W., Pratiwi, A., & Anshari, F. (2020). Analisis Pengaruh Kampanye Public Relations #SaveGBK dan Identitas Sosial Pada Sikap Jakmania Depok. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(2), 154. <https://doi.org/10.31315/jik.v18i2.3539>
- Kamilla Azhar, J., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2023). Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban. *Share : Social Work Journal*, 13(1), 82–91. <https://doi.org/10.45814/share.v13i1.46543>
- Karki, J., Rushton, S., Bhattarai, S., & De Witte, L. (2023). Access to assistive technology for persons with disabilities: a critical review from Nepal, India and Bangladesh. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 18(1), 8–16. <https://doi.org/10.1080/17483107.2021.1892843>
- Komnas Perempuan. (2024). CATAHU 2024: Menata Data, Menajamkan Arah Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024. In *Komnas Perempuan*.
- Lecomte, U., Berjillos, A. de los R., Lethielleux, L., Deroy, X., & Thenot, M. (2024). Social Understanding of Disability: Determinants and Levers for Action. *Behavioral Sciences*, 14(9), 733. <https://doi.org/10.3390/bs14090733>
- Ledingham, E., Wright, G. W., & Mitra, M. (2022). Sexual Violence Against Women With Disabilities: Experiences With Force and Lifetime Risk. *American Journal of Preventive Medicine*, 62(6), 895–902. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2021.12.015>
- Lindsay, S., & Fuentes, K. (2022). It Is Time to Address Ableism in Academia: A Systematic Review of the Experiences and Impact of Ableism among Faculty and Staff. *Disabilities*, 2(2), 178–203. <https://doi.org/10.3390/disabilities2020014>

- Mailhot Amborski, A., Bussi res, E. L., Vaillancourt-Morel, M. P., & Joyal, C. C. (2022). Sexual Violence Against Persons With Disabilities: A Meta-Analysis. In *Trauma, Violence, and Abuse* (Vol. 23, Number 4, pp. 1330–1343). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.1177/1524838021995975>
- McNally, P., Taggart, L., & Shevlin, M. (2021). Trauma experiences of people with an intellectual disability and their implications: A scoping review. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 34(4), 927–949. <https://doi.org/10.1111/JAR.12872>
- McQueen, K., Murphy-Oikonen, J., Miller, A., & Chambers, L. (2021). Sexual assault: women’s voices on the health impacts of not being believed by police. *BMC Women’s Health*, 21(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/S12905-021-01358-6>
- Muktiwibowo, A., & Prayogi, A. (2022). Peran Pekerja Sosial Masyarakat dalam Memberikan Pelayanan Reehabilitasi Sosial kepada Anak Penyandang Disabilitas Berbasis Masyarakat. *Pekerjaan Sosial*, 21(1). <https://doi.org/10.31595/peksos.v21i1.533>
- Ramdyanti, B. D., Susilowati, E., & Rahayuningsih, E. (2022). Praktik Intervensi Krisis dalam Penanganan Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual: Studi pada Pekerja Sosial Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus —BRSAMPK Paramita Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Pekerjaan Sosial*, 21(1), 110–121. <https://doi.org/10.31595/peksos.v21i1.539>
- Silvia Pramashela, F., & Abdul Rachim, H. (2021). Aksesibilitas pelayanan publik bagi Penyandang disabilitas di Indonesia. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial e*, 4(2), 225–232.
- Tan, W. (2021). Kondisi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas : Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals. *RechtIdee*, 16(1), 18–36.
- Tangney, J. P., & Dearing, R. L. (2022). *Shame and guilt*. Guilford Press.
- Tarigan, T. L. Br., & Rosmalinda. (2025). Kekerasan Seksual Terhadap Anak Penyandang Disabilitas. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.55>
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2), 4. <https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v20i2.1074>
- Wong, S. C. P., & Gordon, A. (2006). The validity and reliability of the Violence Risk Scale: A treatment-friendly violence risk assessment tool. *Psychology, Public Policy, and Law*, 12(3), 279–309. <https://doi.org/10.1037/1076-8971.12.3.279>